

## **BAB IV**

### **SEKURITISASI TERHADAP NGO ASING DI RUSIA**

Pada bab IV ini dibahas analisis terhadap kasus pembubaran lima belas NGO afiliasi asing di Rusia menggunakan konsep-konsep kunci teori sekuritisasi, sesuai dengan metode dan pemaparan proses sekuritisasi yang ditetapkan oleh Mazhab Copenhagen maupun Thierry Balzacq selaku tokoh Mazhab Paris. Tujuan penulisan bab ini ditujukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor, *speech act*, *referent object*, ancaman eksistensial dan *extraordinary measures* yang terdapat dalam kasus tersebut, sehingga hipotesis yang sebelumnya telah dinyatakan dalam pendahuluan pun dapat dibuktikan kebenarannya.

Sistematika penulisan pada bab IV terdiri dari tujuh sub-bab. Setiap sub-bab ini ditujukan untuk fokus membahas setiap konsep kunci dalam teori sekuritisasi yang diperlukan untuk menganalisis kasus pembubaran belasan NGO asing di Rusia ini. Sub-bab pertama berjudul “Tinjauan Sektor Sosial Kemasyarakatan dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia.” Dalam sub-bab ini dilakukan tinjauan dan identifikasi terhadap sektor keamanan yang terdapat pada kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia tersebut.

Kemudian pada keenam sub-bab selanjutnya, dilakukan telaah dan analisis terhadap masing-masing konsep kunci yang terdapat dalam teori sekuritisasi sesuai dengan kasus pembubaran NGO afiliasi asing yang menjadi objek kajian skripsi ini. Konsep-konsep sekuritisasi yang digunakan untuk menganalisis kasus bersangkutan, dijelaskan secara mendetail dalam sub-bab masing-masing, sehingga terdapat enam sub-bab terpisah yang fokus mengkaji konsep kewarganegaraan Federasi Rusia berupa *russkii* dan *rossiiskii*, kemudian diikuti oleh sub-bab analisis *securitizing actor* dan *target audience*, *speech act*, *fuctional actor*, *referent object* dan tindakan di luar batas normal yang terjadi alias *extraordinary measures*.

## **A. Tinjauan Sektor Sosial-Kemasyarakatan dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia**

Pembahasan sektor keamanan dalam kerangka teori pada Bab I, menyimpulkan bahwa kasus pembubaran lima belas NGO afiliasi asing di Rusia terbukti memiliki keterhubungan tematik yang relevan dengan sektor sosial-kemasyarakatan dalam skema teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Buzan, Waever dan de Wilde. Menurut ketiga tokoh ini, konsep sentral dalam sektor ini adalah identitas, sehingga segala sesuatu yang berpotensi mengancam kelangsungan suatu identitas kolektif yang dianut oleh komunitas atau kelompok sosial tertentu, akan dipersepsi sebagai sumber permasalahan keamanan yang harus segera ditangani. Konsep dasar dalam sektor sosial-kemasyarakatan lainnya yang penting untuk dipahami adalah keamanan identitas (*identity security*) atau biasa disebut pula sebagai keamanan masyarakat (*societal security*). Keamanan identitas ini mengacu kepada kelangsungan eksistensi identitas kelompok dan kemampuan identitas tersebut untuk menopang atau menjamin kelangsungan hidupnya sendiri, dalam kurun waktu dan lokasi tertentu (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 119). Dalam konteks tatanan dunia kontemporer, *referent object* di sektor sosial-kemasyarakatan yang paling umum ditemukan di berbagai kasus sekuritisasi adalah identitas suku, klan, bangsa, kelompok etnis atau minoritas, peradaban, agama dan ras (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 123).

Terdapat tiga jenis isu yang umumnya digunakan untuk menjelaskan kemunculan ancaman dalam konsep keamanan identitas. Ketiga isu tersebut adalah migrasi, kompetisi horizontal dan kompetisi vertikal (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 120-121). Isu migrasi berkenaan dengan kedatangan massal penduduk asing di wilayah tertentu, yang menyebabkan penduduk pribumi mempersepsi bahwa identitas luhurnya sedang terancam eksistensinya dikarenakan perubahan komposisi demografi di wilayah tersebut.

Kompetisi horizontal merupakan isu keamanan yang menarasikan bahwa kelestarian budaya dan identitas asli penduduk pribumi sedang mengalami ancaman eksistensial dikarenakan masifnya invasi dan penetrasi produk-produk budaya asing ke wilayah penduduk pribumi. Dalam kompetisi horizontal, penduduk pribumi tidak mengalami ancaman dalam bentuk fisik, integritas wilayah maupun kompetisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, ancaman yang dipersepsi tersebut hanyalah berada dalam tatanan sosio-kultural yang bersifat psikologis.

Sedangkan kompetisi vertikal dapat dipahami sebagai isu keamanan yang disebabkan oleh adanya ancaman berupa kemunculan gerakan-gerakan sosial-politik yang bertujuan untuk menciptakan atau merevitalisasi identitas alternatif yang dianggap asing oleh penduduk mayoritas. Gerakan-gerakan ini dapat berupa aksi separatisme yang bertujuan untuk membangkitkan kembali identitas suku, etnis atau kelompok minoritas tertentu yang sebelumnya dianggap telah punah atau berhasil dibungkam oleh mayoritas, maupun berupa gerakan regionalis seperti yang dilakukan oleh elit-elit Uni Eropa di Brussels (Buzan, Waeber & de Wilde, 1998: 121).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditetapkan bahwa kasus pembubaran NGO di Rusia yang menjadi objek kajian skripsi ini, termasuk ke dalam isu kompetisi horizontal. Seperti yang telah disinggung dalam latar belakang di Bab I, pada kasus ini publik Rusia selaku *target audience*, mempersepsi adanya ancaman eksistensial berupa keberadaan NGO afiliasi asing yang aktif berupaya mewujudkan agenda westernisasi dan liberalisasi di wilayah Rusia. Keberadaan NGO afiliasi asing pengusung agenda pro-Barat ini dinilai sedang mengancam kelangsungan dan kelestarian *referent object* yang berupa budaya dan identitas asli Rusia. Pada kasus ini, *referent object* yang relevan ialah berupa identitas bangsa Rusia dan identitas peradaban Eurasia. Narasi sosio-kultural berupa adanya ancaman eksistensial terhadap identitas kolektif

Rusia ini sesuai dengan pembahasan Buzan, Waever dan de Wilde terkait benturan identitas luhur Rusia *vis a vis* identitas Barat beserta nilai dan budaya Barat yang terwujud dalam liberalisme, sekulerisme dan demokrasi.

Seperti yang telah dibahas dalam bab II bagian sub-bab “Konsepsi Sektor NGO Rusia Menurut Perspektif Pemerintahan Putin,” terdapat nilai, gagasan, praktik, budaya dan konsep khas Rusia yang tidak kompatibel, dan bahkan malah bertentangan dengan nilai, budaya, ideologi dan konsep yang berasal dari Barat. Berikut ini kutipan yang mewakili pandangan ketiga tokoh tersebut terkait pertentangan identitas Rusia versus Barat:

*“The interregional, horizontal concern about other identities intruding is mainly a problem for Russia, which is worried about ... ‘world order’ of concentric circles, with Russia somewhere in the second circle. The West/United States as a global factor plays an important role for Russia, both at the societal level ... which leads to a critique of the Western-imposed strategy—and at the diplomatic level in terms of a search for a dignified role for Russia”* (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 137).

## **B. *Ruskii* dan *Rossiiskii* Sebagai Konsep Pembentuk Identitas Kolektif Rusia Modern di Era Putin**

Sebelum panjang lebar menelaah *speech act* dan *referent object* sebagai konsep paling sentral dalam teori sekuritisasi (Eroukhmanoff, 2017: 105), maka perlu dibahas aktor-aktor yang terlibat dalam kasus pembubaran NGO ini beserta peran konseptualnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembahasan terhadap *speech act* dan *referent object* secara lebih fokus, mendetail dan juga mendalam. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam sub-bab ini akan dilakukan identifikasi untuk menetapkan *securitizing actor* dan *target audience* yang sah dan sesuai dengan kasus pembubaran NGO afiliasi asing di Rusia.

Tentunya jika langsung mengaplikasikan konsep *securitizing actor* dan *target audience* ke dalam proses tindakan sekuritisasi terhadap sektor NGO Rusia ini, akan ditemukan indikasi seperti yang disinggung dalam kerangka teori di Bab I, yakni pemerintahan Putinlah yang aktif berupaya melakukan *securitizing move* dengan mengklaim dan mendeklarasikan adanya ancaman dari NGO afiliasi Barat melalui berbagai saluran media dan komunikasi publik. Dan akan ditemukan pula bahwa *securitizing move* ini memang khusus ditujukan kepada publik Rusia. Namun untuk berusaha mencapai pemahaman yang lebih mendetail, fundamental dan utuh terkait kasus pembubaran NGO afiliasi asing di Rusia ini, maka melalui kerangka teori sekuritisasi dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam sehingga benar-benar ditemukan pola ataupun struktur hubungan diskursif antara *securitizing actor* dan *target audience*. Menurut Thierry Balzacq, penemuan interaksi diskursif yang bersifat struktural ini merupakan salah satu tujuan penting dilakukannya analisis kasus keamanan menggunakan teori sekuritisasi. Balzacq mengemukakan bahwa isu keamanan itu dibentuk melalui tindakan politik yang bersifat diskursif (Balzacq, 2011: 1). Hanya dengan aksi diskursif sajalah, audience memperoleh stimulus untuk melakukan suatu respon yang dikehendaki oleh *securitizing actor* (Balzacq, 2011: 23).

Dengan mengacu kepada kesimpulan pada sub-bab sebelumnya yang menyatakan bahwa kasus pembubaran NGO ini merupakan kasus sekuritisasi yang berada dalam sektor sosial-kemasyarakatan, maka identitas aktor yang berperan sebagai *securitizing actor* dan *target audience* dapat ditetapkan melalui hasil analisis terhadap konsep *identity security* sebagai konsep sentral dalam sekuritisasi sektor sosial-kemasyarakatan. Dalam kasus ini, *identity security* mengacu kepada identitas kolektif yang disepakati oleh segenap warga negara Rusia.

Identitas nasional yang disepakati bersama oleh warga negara Rusia, dapat dilihat dari konsep kewarganegaraan Federasi Rusia yang dibedakan ke dalam dua istilah berbeda, yakni *russkii* dan *rossiiskii* (Galeotti & Bowen, 2014; Oversloot, 2007: 45). *Russkii* merupakan sebutan untuk warga negara Rusia yang beretnis Slavia Timur (*Ruskiye*), berbahasa asli Rusia (*Rússkiy yazýk*) dan mayoritasnya beragama Kristen Ortodoks. Sedangkan *rossiiskii* adalah istilah resmi, kolektif dan inklusif untuk setiap warga negara Rusia, tanpa memandang perbedaan etnis, suku, ras, agama maupun identitas sosio-kultural lainnya (Laruelle, 2017). Berdasarkan konsep identitas kenegaraan khas Rusia yang telah digunakan semenjak era Yeltsin ini, maka warga negara Rusia yang beretnis Slavia Timur dapat dikategorikan sebagai *russkii* dan *rossiiskii*. Sedangkan warga negara beretnis non-Slavia Timur seperti Tatar, Ukraina, Chechnya, Bashkir dan lain sebagainya, tidak dapat disebut sebagai *russkii*, namun berstatus sebagai *rossiiskii*.

Berkaitan dengan hal ini, perlu ditelaah bahwa sejak 2005, Presiden Putin memposisikan gaya kepemimpinan dan administrasinya di kisaran konservatisme moderat yang menolak ideologi ekstem kiri maupun kanan (Laruelle, 2017). Pada pertemuan puncak G20 tahun 2013, Putin pun menyatakan identitas politiknya secara jelas dan tegas. Putin mendefinisikan dirinya sebagai “*a pragmatist with a conservative perspective*” (President of Russia Official Site, 2013). Ideologi konservatisme moderat dengan karakteristik pragmatisme politik yang dianut oleh administrasi Putin ini, menolak tegas adanya politik identitas yang umumnya dilakukan oleh berbagai gerakan dan organisasi kemasyarakatan berhalauan kanan ekstem di Rusia (Laruelle, 2017).

Administrasi Putin menolak ideologi etnonasionalisme yang bertujuan menciptakan negara Rusia yang eksklusif bagi warga negara berstatus *russkii*, dan melegalkan diskriminasi

dan persekusi tersistematis terhadap warga negara non-*rosskii* yang merupakan etnis minoritas di Rusia. Penolakan yang tegas terhadap etnonasionalisme ini terlihat dari disahkannya amandemen Artikel 282 yang mengatur hukuman berat terhadap upaya provokasi dan tindak kebencian antar etnis di Rusia, ke dalam Kode Hukum Pidana Federasi Rusia pada Desember 2004 (Roudik, 2016). Bukti lain perlawanan rezim Putin terhadap ideologi etnonasionalisme ini, juga terlihat dari penangkapan pimpinan dan penggerebekan sekretariat milik kelompok-kelompok etnonasionalis yang terlibat dalam memicu terjadinya kerusuhan dan penyerangan terhadap etnis minoritas di Kondoponga pada September 2006 (Shlapentokh, 2010: 192-193).

Argumentasi terkait adanya penolakan rezim Putin terhadap paham etnonasionalisme dan dukungan Putin terhadap negara Rusia yang inklusif dan multi-etnis, diperkuat oleh kajian yang dilakukan Mark Galeotti dan Andrew Bowen. Menurut Galeotti dan Bowen, Putin menolak ideologi etnonasionalisme yang bersifat eksklusif dan sempit, dan sebaliknya berupaya menciptakan nasionalisme baru Rusia yang selaras dengan semangat inklusivitas *rossiiskii*. Pandangan Putin terkait nasionalisme *rossiiskii* beserta pentingnya semangat inklusivitas ini, dinyatakan Putin sebagai berikut:

*“For centuries, Russia developed as a multi-ethnic nation, a civilisation-state bonded by the Russian people, Russian language and Russian culture native for all of us, uniting us and preventing us from dissolving in this diverse world. We treat and will continue to treat with great care and respect every ethnic group, every nation in the Russian Federation. Our diversity has always been and remains the source of our beauty and our strength”* (President of Russia Official Site, 2012).

Menurut Galeotti dan Andrew, pernyataan resmi Putin ini tidak hanya membuktikan dukungannya terhadap gagasan negara Rusia yang multi-etnis, namun juga kepada ide

Peradaban Rusia sebagai salah satu peradaban besar dunia dan penerus sah dari Kekaisaran Byzantium yang telah ada sejak seribu tahun yang lalu. Pandangan Galeotti dan Andrew ini nampaknya diperkuat oleh pernyataan Putin dalam salah satu pidato kenegaraannya sebagai berikut:

*“In order to revive national consciousness, we need to link historical eras and get back to understanding the simple truth that Russia did not begin in 1917, or even in 1991, but rather, that we have a common, continuous history spanning over one thousand years, and we must rely on it to find inner strength and purpose in our national development”* (President of Russia Official Site, 2012).

### **C. *Rossiiskii* Sebagai Konsep Pengidentifikasi *Securitizing Actor* dan *Target Audience* dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia**

Dilihat dari perspektif teori sekuritisasi, umumnya pembentukan identitas kolektif semacam ini terjadi dalam skema dari atas ke bawah (*top to bottom*). Buzan, Waever dan de Wilde menekankan bahwa dalam isu keamanan sektor sosial-kemasyarakatan, identitas nasional umumnya dikonstruksi dan ditetapkan oleh pihak penguasa (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 123). Aktor yang berkuasa inilah pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan konsepsi keamanan yang nantinya akan dianut oleh massa (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 31).

Dalam konteks Rusia kontemporer, maka identitas nasional Rusia yang berupa *rossiiskii* ini, diprakarsai, dikembangkan dan disebarluaskan oleh elit politik kepada rakyat Rusia. Melalui administrasi dan mesin politiknya, Putin menanamkan gagasan nasionalisme *rossiiskii* ini ke dalam pikiran dan kesadaran kolektif rakyat Rusia, sehingga konsep *rossiiskii* ini pun diterima secara positif oleh publik. Pola interaksi *top to bottom* antara elit politik dengan rakyat inilah yang menjadi struktur hubungan diskursif di sepanjang era

kepemimpinan Putin, dan selalu berulang di setiap interaksi antara administrasi Putin dengan sektor sipil Rusia.

Adanya pola diskursif dari atas ke bawah ini dapat dilihat dalam kebijakan-kebijakan represif pemerintah yang telah dijabarkan secara panjang lebar di bab III. Dalam kasus pendirian *Public Chamber*, pemerintah aktif menanamkan nilai independensi dan penolakan terhadap pendanaan asing kepada sektor NGO domestik dengan cara mengadakan *grant competition* dan berbagai skema pendanaan dalam negeri lainnya. Dalam konteks penegakkan Hukum Agen Asing, administrasi Putin pun menanamkan sebuah ide ke dalam kesadaran kolektif sektor NGO Rusia, bahwa hanya instansi pemerintah yang berwenang dalam menetapkan NGO mana saja yang dikenai status agen asing. Interaksi diskursif *top to bottom* yang serupa juga terjadi dalam kasus pembubaran lima belas NGO afiliasi asing, melalui pengesahan *Law on Undesirable Organisations* rezim Putin menanamkan praktik dan aturan baru ke dalam sektor NGO Rusia, yakni kewenangan absolut pemerintah dalam membubarkan setiap NGO yang sebelumnya telah divonis sebagai *undesirable organisation* dikarenakan NGO terkait menerima pendanaan asing.

Pola hubungan diskursif berstruktur *top to bottom* yang sering berulang di era kepemimpinan Putin ini, memperlihatkan suatu hierarki yang menempatkan pemerintahan Putin sebagai aktor berkedudukan superior yang aktif berperan dalam upaya sekuritisasi (*securitizing move*). Seperti yang dinyatakan Balzacq (Balzacq, 2011: 23), upaya sekuritisasi ini selalu ditujukan untuk menciptakan stimulus yang mampu mendorong respon atau tindakan dari aktor berkedudukan inferior yang bersifat pasif, sesuai dengan yang dikehendaki oleh aktor pelaku upaya sekuritisasi tersebut.

Dalam skema ini, dapat ditarik inferensi teoretis bahwa rezim Putin selaku aktor berkedudukan superior dapat ditetapkan sebagai *securitizing actor*. Sedangkan rakyat Rusia

yang cenderung bersikap pasif dan reaktif terhadap *securitizing move* layaknya aktor berkedudukan inferior, dapat dinyatakan sebagai *target audience*. Inferensi ini sesuai dengan asumsi inti pertama dalam teori sekuritisasi menurut Balzacq yang telah dibahas dalam bagian asumsi ontologis teori sekuritisasi di kerangka teori Bab I. Asumsi inti pertama mensyaratkan perlunya persetujuan, kesepakatan ataupun kepercayaan *target audience* terhadap klaim ancaman eksistensial yang diutarakan oleh *securitizing actor*, sebagai salah satu syarat ditetapkannya suatu fenomena sebagai kasus sekuritisasi (Balzacq, 2011: 8-9).

Rakyat Rusia selaku *target audience*, juga memiliki hubungan kasualitas dengan kasus pembubaran NGO afiliasi asing ini, dikarenakan setiap rakyat sipil merupakan bagian dari *civil society* yang membentuk sektor NGO Rusia. Rakyat selaku *target audience* pun memiliki hak-hak politik yang dijamin oleh Konstitusi Federasi Rusia, sehingga melalui hak politik tersebut setiap warga negara dapat memberikan dukungan maupun aspirasi politik kepada pemerintah selaku *securitizing actor*, agar melakukan tindakan drastis dan ekstrem berupa pembubaran sepihak terhadap lima belas NGO afiliasi asing, guna menghilangkan ancaman eksistensial berupa agenda liberalisasi dan westernisasi yang diusung belasan NGO tersebut, sehingga identitas dan budaya luhur Rusia pun terselamatkan kelestariannya.

Dalam sub-bab ini, dilakukan tinjauan terhadap identitas nasional Rusia kontemporer yang terwujud dalam konsep *rossiiskii* beserta dukungan Putin terhadap nasionalisme inklusif yang selaras dengan konsep *rossiiskii* tersebut. Selanjutnya ditelaah pula adanya hubungan diskursif dari atas ke bawah (*top to bottom*) yang manifestasinya terjadi berulang kali di sepanjang masa kepemimpinan Putin. Selain itu, dalam sub-bab ini dilakukan pula pengaplikasian asumsi inti ketiga teori sekuritisasi versi Balzacq ke dalam kasus pembubaran NGO afiliasi asing yang menjadi objek telaah dalam skripsi

ini. Tinjauan dan kajian tersebut menghasilkan sebuah inferensi teoretis yang menyatakan administrasi Putin sebagai *securitizing actor* dan rakyat Rusia sebagai *target audience* dalam kasus pembubaran lima belas NGO afiliasi asing di Rusia ini. Terkait dengan identifikasi aktor fungsional, hanya dapat ditetapkan setelah dilakukan analisis konseptual terhadap *speech act*. Sehingga aktor fungsional yang relevan dalam kasus ini akan ditetapkan dalam sub-bab selanjutnya.

#### **D. Analisis *Speech Act* dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia**

Dalam pembahasan asumsi ontologis konsep keamanan dan teori sekuritisasi, telah disimpulkan bahwa *speech act* merupakan salah satu konsep kunci dalam teori sekuritisasi. Ole Waever mengemukakan bahwa suatu isu hanya dapat disebut sebagai isu keamanan, jika dalam isu tersebut terdapat tindakan *speech act* (Waever, 1998: 55). Dalam kata lain, dapat tidaknya suatu fenomena ditetapkan sebagai kasus sekuritisasi, ditentukan oleh terdapat tidaknya tindakan *speech act* dalam fenomena tersebut. Pada bagian asumsi ontologis teori sekuritisasi yang telah dibahas di kerangka teori Bab I, telah disimpulkan bahwa *speech act* haruslah bersifat performatif, yakni memiliki kemampuan untuk membentuk realitas intersubjektif yang dipercayai kebenarannya oleh *target audience*. *Speech act* pun umumnya dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang otoritatif terhadap pihak yang menjadi sasaran tindakan *speech act* tersebut.

Para sarjana studi keamanan memiliki perbedaan pendapat terkait praktik atau tindakan yang dapat digolongkan ke dalam *speech act*. Buzan, Waever, de Wilde dan tokoh-tokoh lainnya yang memelopori pengembangan awal teori sekuritisasi, umumnya mendefinisikan *speech act* sebagai pernyataan atau ujaran secara verbal maupun tertulis yang dilakukan di ruang-ruang publik atau disebarkan melalui media massa (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 26).

Sedangkan spesialis teori sekuritisasi kontemporer yang umumnya tergabung dalam Mazhab Paris seperti Didier Bigo dan Thierry Balzacq, memandang bahwa setiap tindakan linguistik yang mencakup penggunaan metafora, citra, analogi stereotip, emosi, gestur, kebisuan dan bahkan kebohongan, yang ditujukan untuk memanifestasikan keberadaan ancaman eksistensial tertentu, dapatlah digolongkan sebagai *speech act* (Balzacq, 2011: 3).

Pengertian mendasar atas konsep *speech act* di atas, banyak ditemukan dalam kasus yang menjadi objek telaah skripsi ini. Dalam konteks kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia, pemerintahan Putin didapati melakukan berbagai ujaran, pernyataan maupun tindakan linguistik yang dilakukan berkali-kali di ruang publik dan disebarakan melalui media massa. Tindakan *speech act* yang dilakukan Presiden Putin maupun elit Kremlin lainnya, selalu dilakukan secara langsung dan tegas dalam acara-acara kenegaraan resmi.

Berbagai tindakan *speech act* yang jelas ditujukan untuk mengkonstruksi adanya ancaman eksistensial berupa NGO afiliasi asing di Rusia, telah berulang kali dilakukan Putin sejak periode kedua masa kepresidenannya. Salah satu *speech act* paling awal yang dilaksanakan secara langsung oleh Presiden Putin, terjadi saat Konferensi Keamanan Munich pada 10 Februari 2007. Dalam pertemuan kenegaraan resmi tersebut, Putin menyatakan “*What bothers us? I can say —and I think that it is clear for all— that when these nongovernmental organizations are financed by foreign governments, we see them as an instrument that foreign states use to carry out their Russian policies*” (Schofield, 2007).

Tindakan *speech act* lainnya yang pernah dilakukan langsung oleh Putin, terjadi dalam Rapat Besar *Federal Security Service* (FSB). Pada sesi pidato pembuka yang disorot oleh wartawan dari berbagai media massa nasional, Putin dengan tegas menyatakan:

*“Western special services continue their attempts at using public, non-governmental and politicised organisations to pursue their own objectives, primarily to discredit the authorities and destabilise the internal situation in Russia ... it is pointless entering into a discussion with those who are operating on orders from the outside in the interests of some other country rather than their own”* (Nechepurenko, 2015).

Patut dipahami bahwa pernyataan resmi yang ditujukan kepada publik Rusia melalui jaringan media massa tersebut, dilakukan sekitar dua bulan sebelum disahkannya *Law on Undesirable Organisations*. Berkenaan dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa pernyataan di atas adalah tindakan *speech act* yang dilakukan sebagai fase awal proses *securitizing move* yang dilakukan oleh administrasi Putin, melalui pemingkiaan ancaman eksistensial berupa adanya agenda, kepentingan dan agen-agen Barat di Rusia.

Selain Putin, *securitizing actor* yang aktif melakukan *speech act* adalah elit-elit politik yang tergabung dalam kubu pro-Putin. Salah satu elit ini adalah Alexander Tarnavsky. Tarnavsky merupakan anggota legislatif yang menginisiasi perancangan draf *Law on Undesirable Organisations*. Dalam konferensi pers terbuka yang diliput oleh kantor berita Tass, Tarnavsky melakukan tindakan *speech act* yang isi ujarannya adalah sebagai berikut:

*“... there are foreign organisations that are unfriendly to Russia. Today is such a time when it’s impossible not to notice that some foreign organisations that don’t conduct themselves in the best manner. They do this for different reasons, some at the request of intelligence services, some on the basis of other considerations”* (Luhn, 2015).

Pernyataan *speech act* di atas dengan jelas ditujukan untuk meneruskan narasi yang terdapat dalam *speech act* sebelumnya yang dilakukan oleh Putin. Narasi induktif-spekulatif ini berupa adanya ancaman eksistensial yang sedang menyergap Rusia. Ancaman ini dinarasikan berasal dari

aktivitas organisasi-organisasi asing di Rusia. Tindakan *speech act* Tarnavsky selanjutnya dilakukan dalam sesi wawancara publik yang diadakan perusahaan media *Russia Direct*, jurnalis Pavel Koshkin mewawancarai Tarnavsky selaku narasumber dalam acara tersebut. Kepada awak media, Tarnavsky melaksanakan upaya *speech act* yang transkripsinya sebagai berikut:

“... *Foreign organization ... they widely cover and target some specific political issues [such as elections]. Actually, this is double standards. We also do understand that, mostly, foreign NGOs don't earn any money by themselves. They receive this money. They are the channels for others who earn and consume. They get grants and scholarships and, thus, they depend on those who give them money. And money comes either from very rich philanthropists, who direct the money for certain projects, or transnational corporations, owned by these philanthropists, or the budgets of other countries. Those who pay order the music. And this is the problem of all sectors of NGOs, including foreign ones, beginning with Human Rights Watch and ending with Carnegie Moscow Center. They have a target for funding, they have to work off it and promote their own agenda in Russia. And we don't like it and find it suspicious*” (Koshkin, 2015).

Pernyataan tersebut ditujukan untuk membingkai isu terkait adanya NGO afiliasi asing yang aktif berkegiatan di Rusia. Tarnavsky berupaya meyakinkan publik Rusia selaku *target audience* dalam *speech act* ini, bahwa NGO afiliasi asing tidak hanya memperoleh pendanaan asing, namun juga turut mengusung dan memperjuangkan agenda dan kepentingan asing di wilayah Rusia. Pernyataan tersebut pun dilakukan pada 28 Mei 2015, yakni hanya berselang lima hari saja pasca disahkannya *Law on Undesirable Organisations*. Ditinjau secara kronologis, dapat dipahami bahwa tindakan *speech act* yang dilakukan Tarnavsky ini ditujukan untuk mengembangkan narasi spekulatif adanya ancaman

eksistensial berupa agenda, kepentingan dan NGO afiliasi Barat di Rusia.

Selain itu, tindakan *speech act* di atas juga ditujukan untuk menanamkan realitas intersubjektif dalam kesadaran kolektif rakyat Rusia, bahwa otak intelektual dibalik kemunculan ancaman eksistensial ini adalah donor dari Barat yang berupa individu, korporasi maupun institusi negara tertentu yang sedang berupaya untuk mewujudkan agendanya di Rusia. Dalam pernyataan tersebut, secara eksplisit disebutkan dua NGO asal Amerika Serikat yakni *Human Rights Watch* dan *Carnegie Moscow Center* yang keduanya mengusung agenda demokratisasi, westernisasi dan penyebaran ideologi liberal di negara-negara berkembang. Sehingga, secara implisit, Tarnavsky menyampaikan bahwa donor asal Barat yang berupa individu, korporasi maupun lembaga negara tersebut sedang berupaya mewujudkan agenda demokratisasi, westernisasi, penyebaran liberalisme ataupun nilai-nilai Barat lainnya yang tidak kompatibel dengan budaya dan identitas nasional Rusia. Di akhir pernyataannya, Tarnavsky pun menggunakan teknik retorika publik yang disebut *appeal to emotion*, guna mengajak publik Rusia untuk turut membenci dan mencurigai aktor-aktor Barat dan NGO domestik yang menerima pendanaan darinya.

Berkenaan dengan tindakan *speech act* oleh Tarnavsky ini, hanya terdapat tentang waktu dua bulan saja sebelum *Law on Undesirable Organisations* ini diterapkan untuk pertama kalinya. Pada 28 Juli 2015, legislasi ini pun diimplementasikan untuk membubarkan *National Endowment for Democracy* (NED) yang merupakan NGO afiliasi asing pertama yang dibubarkan secara sepihak menggunakan *Law on Undesirable Organisations* oleh pemerintahan Putin (Ministry of Justice of The Russian Federation, 2018).

Terkait hubungan tematik antara beberapa *speech act* di atas dengan *referent object*, dapat dilihat pada pernyataan-pernyataan resmi yang diutarakan oleh Putin maupun elit-elit

Kremlin di berbagai kesempatan publik. Menariknya, pernyataan-pernyataan Putin dan jajarannya yang dapat didefinisikan sebagai *speech act* yang mengandung pembahasan terhadap *referent object* berupa identitas kolektif khas Rusia, umumnya mulai dilakukan pasca waktu pengesahan *Law on Undesirable Organisations* pada Mei 2015. Berkaitan dengan hal ini, tindakan *speech act* yang paling kontemporer terjadi saat pidato resmi Putin kepada Majelis Federal Rusia pada 20 Februari 2019 lalu, Putin mengemukakan:

*“Colleagues, we are facing ambitious goals. ... to ensure the best conditions for the self-fulfillment of our people and, hence, provide befitting answers to the challenges of a rapidly changing world, and preserve Russia as a civilisation with its own identity, rooted in centuries-long traditions and the culture of our people, our values and customs. Naturally, we will only be able to achieve our goals by pooling our efforts, together in a united society, if all of us, all citizens of Russia, are willing to succeed in specific endeavours”* (President of Russia Official Site, 2019).

Sebelum menelaah pernyataan tersebut secara lebih dalam, perlu dikutip pula ucapan resmi Putin pada kesempatan lainnya, yang dalam konteks analisis kasus sekritisasi pembubaran NGO afiliasi asing di Rusia dapat diposisikan sebagai *speech act*. Tindakan *speech act* selanjutnya yang mengandung pembahasan terhadap *referent object* berupa identitas nasional Rusia, diujarkan Putin saat sesi diskusi terbuka dalam Rapat Tahunan Perkumpulan Diskusi Internasional Valdai (*Valdai International Discussion Club*) ke lima belas yang diadakan pada 18 oktober 2018. Dalam diskusi umum yang diliput awak media tersebut, Putin mengutarakan gagasan-gagasan yang relevan dengan isu kelestarian peradaban dan identitas nasional Rusia:

*“True heroism can manifest itself, in particular, by defending civilisation from today’s evils. ... Our national identity is what makes us who we are. It is our culture and history. The*

*preservation of the people, ... is not just about physical preservation, ... but also about our identity as a people, otherwise we will simply erode and cease to exist. ... We want to be the Russians, or the Tatars, or the Jews, who live here, or the Mordovians, etc. We have 160 ethnic groups living in the Russian Federation. So why should we let ourselves be eroded? We treasure it and we must talk about it. We must strengthen our identity”* (President of Russia Official Site, 2018).

Kedua pernyataan Putin di atas yang diucapkan setelah disahkannya *Law on Undesirable Organisations*, dalam konteks kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia, dapat diposisikan sebagai *speech act* yang sah dan relevan. Kedua *speech act* tersebut membahas *referent object* yang harus dilindungi bersama oleh segenap rakyat Rusia. *Referent object* ini berupa identitas kolektif Rusia yang mengacu kepada peradaban, budaya, nilai, tradisi dan adat-istiadat luhur bangsa Rusia, yang bersifat eksklusif dan unik karena hanya dimiliki oleh rakyat Rusia dalam konteks *rossiiskii*. Dalam kedua *speech act* ini, Putin juga menekankan adanya ancaman yang membahayakan kelangsungan identitas kolektif tersebut. Putin pun mengajak segenap rakyat (*rossiiskii*) Rusia untuk bersatu dan melibatkan dirinya dalam upaya perlindungan dan pelestarian identitas kolektif Rusia.

Menariknya, dalam kedua *speech act* tersebut, Putin menggunakan diksi bahasa yang cenderung dramatis, emosional dan hiperbolis. Pada *speech act* pertama, diksi semacam ini terlihat pada frasa: “... Jika seluruh warga Rusia bersedia untuk meraih keberhasilan melalui usaha kerasnya masing-masing.” Sedangkan dalam *speech act* kedua, terdapat penggunaan istilah heroisme sejati (*true heroism*). Dalam konteks ujaran *speech act* kedua ini, terdapat narasi romantis yang mengumpamakan upaya perlindungan eksistensi peradaban Rusia, sebagai manifestasi heroisme sejati yang mampu menghalau ancaman-ancaman kejahatan masa kini (*today’s evils*) yang bertujuan untuk meruntuhkan peradaban

Rusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua *speech act* tersebut terbukti sesuai dan koheren dengan pemahaman *speech act* versi Balzacq. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Balzacq beranggapan bahwa *speech act* terwujud ke dalam beraneka macam teknik linguistik (Balzacq, 2011: 3). Beberapa teknik linguistik ini meliputi penggunaan perumpamaan, metafora, *appeal to emotion* dan hiperbola seperti yang terdapat dalam kedua *speech act* di atas.

### **E. Analisis *Functional Actor* dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia**

Pada dua sub-bab sebelumnya telah dilakukan pemaparan dan identifikasi terhadap konsep *securitizing actor*, *target audience* dan *speech act* yang relevan dengan kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia. Maka kini dapat dilakukan tinjauan terhadap *functional actor* yang terlibat dalam kasus tersebut. Seperti yang telah disinggung dalam kerangka teori di bab I, *functional actor* merupakan aktor yang turut mempengaruhi dinamika proses sekuritisasi yang terjadi dalam sektor keamanan tertentu, namun tidak diposisikan sebagai *referent object* maupun *securitizing actor* (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 36). *Functional actor* pada umumnya memiliki pengaruh dan peran yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan pada suatu isu keamanan yang sedang ditelaah tersebut (Balzacq, 2011: 35).

Dalam konteks kasus sekuritisasi pembubaran NGO afiliasi asing di Rusia ini, diargumentasikan bahwa terdapat *functional actor* dalam kasus ini yang berupa perusahaan-perusahaan media massa pro-Putin, utamanya *Russia Today* (RT). *Russia Today* merupakan korporasi media bertaraf internasional yang didirikan dan didanai oleh pemerintah Rusia. *Russia Today* mulai beroperasi sejak 10 Desember 2005. Perusahaan media ini juga berkali-kali dituduh media Barat sebagai saluran propaganda pemerintah Rusia (Ioffe, 2010), dan agen disinformasi yang patuh mengusung kepentingan rezim Putin dalam perang informasi global

(Sasse, 2017). Pendapat ini pun memperkuat argumentasi mengenai peran *Russia Today* sebagai *functional actor* dalam kasus yang ditelaah skripsi ini.

Melalui liputannya yang berupa berita tertulis maupun cuplikan video, *Russia Today* terbukti aktif menyebarluaskan maupun turut mengembangkan narasi spekulatif mengenai adanya ancaman eksistensial berupa agenda westernisasi dan liberalisasi yang dilakukan oleh NGO afiliasi Barat di Rusia. Dalam artikel beritanya yang bertajuk *West tried to prevent Putin's re-election as president since 2011*, *Russia Today* memberitakan adanya NGO afiliasi asing di Rusia yang aktif berusaha memanipulasi hasil pemilu Rusia (Russia Today, 2018). Berita lainnya yang berjudul *US funds organization to sow chaos abroad, but complains about Russian 'meddling'* (Russia Today, 2018) dan *Revolution is the new black: How Western money funds overthrow-your-government classes* (Russia Today, 2019) menarasikan adanya NGO afiliasi Amerika Serikat yang mengusung agenda krisis legitimasi, merencanakan terjadinya *Color Revolution* dan berperan sebagai *fifth column* di berbagai negara tempatnya beroperasi, termasuk Rusia. Sedangkan dalam editorialnya yang berjudul *The long history of US-Russian 'meddling'*, Stephen Cohen selaku editor *Russia Today* menegaskan adanya agenda westernisasi yang dilakukan agen-agen Amerika Serikat berkedok NGO di Rusia, setidaknya sejak era Yeltsin dan berlangsung hingga saat ini (Cohen, 2019). Dalam tulisannya, Cohen mengemukakannya sebagai berikut:

“... almost all of the ‘meddling’ has been committed by the United States. During the 1990s, under the banner of ‘democracy promotion,’ there was a virtual American political invasion of Russia. Washington openly supported, politically and financially, the pro-American faction in Russian politics, as did American mainstream media coverage. US government and foundation funding went to desirable Russian NGOs. ... American meddling in Russia, on the other hand, continued apace, or tried to do so. Until more

*restrictive Russian laws were passed, US funding continued to go to Russian media and NGOs perceived to be in US interests” (Cohen, 2019).*

Terdapat kesamaan teknik pembingkaiian (*framing*) pada berita-berita tersebut, yang ditujukan untuk mengesankan adanya agenda Amerika Serikat di Rusia yang berupa program westernisasi, penyebaran paham liberalisme beserta nilai-nilai Barat yang tidak kompatibel dengan budaya dan identitas luhur Rusia. Dilihat dari segi penggunaan bahasa, *Russia Today* berupaya memperlihatkan adanya standar profesionalisme dan etika jurnalisme di setiap tulisannya dengan mempraktikkan penggunaan kalimat yang jelas, netral dan bebas dari bias. Namun di sisi lain, pemberitaan *Russia Today* selalu mengutip dan hanya menyertakan pernyataan, pendapat dan sudut pandang dari narasumber yang dikenal pro-Putin, baik itu birokrat negara, cendekiawan, politikus maupun tokoh-tokoh lainnya. Pada pemberitaan pemilu Rusia di atas, jurnalis *Russia Today* hanya mengutip Senator Andrey Klimov selaku anggota Duma yang dikenal mendukung rezim Putin (Kirk, 2017), tanpa menyertakan pendapat aktivis NGO yang kritis terhadap kredibilitas pemilu Rusia.

Berita selanjutnya yang mengulas NGO afiliasi Amerika Serikat sebagai aktor intelektual dibalik agenda delegitimasi beserta fenomena *Color Revolution* di negara-negara pecahan Uni Soviet, terbukti juga hanya mengutip sumber-sumber pemerintahan Putin tanpa turut menyertakan argumentasi dari pihak-pihak anti-Putin. Berita tersebut mengutip jurnalis Max Blumenthal. Blumenthal merupakan tokoh anti-Zionisme yang kritis terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah (Lucas, 2017). Wartawan independen ini beberapa kali dituduh sebagai agen disinformasi yang loyal dan patuh kepada pemerintahan Putin (Silverstein, 2019).

Sedangkan berita ketiga, menggunakan teknik pembingkaiian yang sedikit berbeda dengan kedua berita

lainnya. Berita ini mengutip perkataan beberapa aktivis muda anti-Putin, yang jelas ditujukan untuk mendemonisasi aktivis-aktivis tersebut di mata pembaca. Salah satu kutipan ini berasal dari seorang aktivis yang menuturkan penggunaan rumor dan berita bohong untuk menumbuhkan rasa keraguan di tubuh rakyat terhadap pemerintahnya. Berikut ini kalimat yang dikutip oleh *Russia Today*:

*“We can spread a rumor that the authorities are going to cut down trees. Sure, that’s not true, but if we scare enough people, if we make them believe they are about to lose something good, that might help make them more active and start asking the government questions”* (Russia Today, 2019).

Patut diperhatikan bahwa perusahaan media yang aktif berperan sebagai *functional actor* dalam kasus sekuritisasi pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia ini tidaklah hanya *Russia Today*. Setidaknya, terdapat belasan korporasi media pro-Putin berskala domestik yang juga turut berperan sebagai *functional actor* dalam kasus ini. Salah satu korporasi berita berskala internasional yang dapat diposisikan sebagai *functional actor* dalam kasus pembubaran NGO afiliasi asing tersebut adalah Kantor Berita *Sputnik*.

Kantor Berita *Sputnik* merupakan salah satu korporasi media yang turut berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan narasi spekulatif yang diutarakan Putin dan jajarannya dalam bentuk *speech act* tersebut. Sebagai perusahaan berita milik pemerintah, *Sputnik* turut aktif mempublikasikan pemberitaan terkait adanya agen-agen Barat berkedok NGO yang sedang merealisasikan agenda dan kepentingan Barat di wilayah Rusia. Misalnya dalam berita daring dalam situs resmi *Sputnik* yang bertajuk *Send 'Em All Away! US Publication Blasts US-funded Russian NGOs*, Daniele Pozzati selaku jurnalis *Sputnik* menyatakan dukungan kantor beritanya terhadap kebijakan represif pemerintahan Putin terhadap sektor NGO Rusia melalui tulisan berikut: “... *Russian fears are justified. ... Russia should take a further step*

*versus (foreign) NGOs: send them all away*” (Pozzati, 2015). Berita daring tersebut ditutup Pozzati dengan mempertegas sentimen paranoidnya terhadap keberadaan NGO afiliasi asing di Rusia yang tentunya sejalan dengan sikap konfrontatif dan kebijakan represif administrasi Putin di sektor NGO. Berikut ini kalimat penutup yang ditulis Pozzati: “*Another case could be made to rebrand NGOs for what they really are: FGO, or foreign governments’ organizations. And that still would be kind towards them*” (Pozzati, 2015).

Beberapa berita di atas dapat digunakan sebagai bukti anekdot yang dapat digunakan untuk membuktikan terdapatnya *functional actor* berupa perusahaan media massa pro-Putin seperti *Russia Today* dan *Sputnik* dalam kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia. Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa tersebut, dipenuhi bias dan keberpihakan kepada narasi yang dikonstruksi rezim Putin. Bias semacam ini terlihat dari preferensi pemberitaan yang hanya memuat pendapat, pernyataan dan pandangan narasumber pro-Putin, dan tidak mengulas satu pun komentar dan sudut pandang yang dinilai kritis terhadap rezim Putin.

Hasil telaah terhadap berita-berita tersebut juga memperlihatkan bahwa media massa selaku *functional actor* dalam kasus ini, berperan dalam meliput dan menyebarluaskan narasi resmi administrasi Putin sesuai isi *speech act* yang telah dibahas sebelumnya. Tak hanya itu, media massa pendukung Putin ini juga turut mengembangkan narasi yang awalnya dikonstruksi oleh pemerintahan Putin, dan mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa kontemporer yang mampu menarik perhatian publik di dalam maupun luar negeri, seperti fenomena terjadinya *Color Revolution*, keterlibatan Rusia di Suriah, hingga demonstrasi massal anti-Putin di delapan puluh lokasi berbeda pada Oktober 2017 lalu (Bennetts, 2017).

## F. Analisis *Referent Object* dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam sektor keamanan menurut Barry Buzan pada kerangka teori Bab I, perlu ditekankan bahwa dalam teori sekuritisasi, setiap sektor keamanan memiliki *referent object* tertentu yang berbeda-beda. Dalam sektor keamanan sosial-kemasyarakatan yang terbukti relevan dengan kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia, secara teoretis *referent object* ini ditentukan oleh formulasi keamanan identitas (*identity security*) dalam setiap kasus sekuritisasi. Keamanan identitas ini mengacu kepada kelangsungan eksistensi identitas kolektif tertentu yang disepakati oleh *target audience* (Eroukhanoff, 2017: 105), misalnya seperti identitas suku, klan, bangsa, kelompok etnis atau minoritas, peradaban, agama maupun ras (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 123).

Dalam sub-bab “*Russkii* dan *Rossiiskii* Sebagai Konsep Pembentuk Identitas Kolektif Rusia Modern di Era Putin” pun telah dikemukakan adanya konsep kewarganegaraan khas Federasi Rusia yang dipilah ke dalam istilah *russkii* dan *rossiiskii* (Galeotti & Bowen, 2014; Oversloot, 2007: 45). Jika *russkii* cenderung bersifat eksklusif karena hanya ditujukan untuk menyebut kumpulan warga negara Rusia beretnis Slavia Timur (*Ruskiye*), maka *rossiiskii* memiliki konotasi inklusif dan ditujukan untuk seluruh warga negara Rusia tanpa mempertimbangkan perbedaan etnis, suku, ras, agama maupun identitas sosio-kultural lainnya (Laruelle, 2017). Pada pemaparan sub-bab “*Russkii* dan *Rossiiskii* Sebagai Konsep Pembentuk Identitas Kolektif Rusia Modern di Era Putin,” juga telah dikemukakan adanya dukungan administrasi Putin terhadap ide-ide kebangsaan yang bersifat inklusif beserta penggunaan *rossiiskii* sebagai identitas kolektif bagi warga negara Rusia dalam berbagai kegiatan kenegaraan yang diliput oleh pers.

Pada sub-bab identifikasi *referent object* ini, akan dibahas beberapa gagasan-gagasan utama yang menjadi akar konseptual pembentukan *rossiiskii* sebagai identitas kolektif yang disepakati oleh rakyat Rusia di era pasca-komunisme. Ide-ide yang menginspirasi formulasi konsep *rossiiskii* tersebut, berasal dari pemikiran tokoh-tokoh intelektual Rusia yang mempengaruhi pandangan politik Putin. Salah satu tokoh intelektual berpengaruh yang paling relevan untuk ditelaah dalam pembentukan identitas nasional Rusia di era kontemporer adalah Aleksandr Dugin.

Aleksandr Gelyevich Dugin atau yang juga biasa dikenal sebagai Alexander Dugin di negara-negara Barat, merupakan seorang analis politik, teoretikus geopolitik dan filsuf berhalauan kanan ekstrem yang pemikiran dan gagasannya dinilai memiliki pengaruh signifikan dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Putin beserta kelompok kecil elit Kremlin pendukungnya. Dugin merupakan mantan Kepala Departemen Hubungan Internasional Fakultas Sosiologi Universitas Negeri Moscow (*Moscow State University*) periode 2009 hingga 2014 (Fitzpatrick, 2014). Dalam dunia pergerakan dan perpolitikan Rusia, Dugin dikenal sebagai tokoh pendiri Partai Bolsevik Nasional (*National Bolshevik Party*) dan Ketua Umum Partai Eurasia (Dugin, 2017; Forthomme, 2019). Oleh publik Rusia, Dugin dikenal sebagai seorang cendekiawan yang menggagas ideologi neo-eurasianisme (*neo-eurasianism*) (Shekhovtsov, 2014).

Beberapa jurnalis dan sarjana memandang adanya kedekatan sosok Dugin dengan tokoh-tokoh penting dalam administrasi Putin maupun Partai Rusia Bersatu (*United Russia Party*) yang merupakan kendaraan politik milik Presiden Putin. Fakta ini dengan jelas memperlihatkan adanya pengaruh Dugin di Kremlin (Umland, 2008). Salah satu elit Kremlin yang dikenal dekat dengan pribadi Dugin adalah Ivan Demidov. Dugin merupakan penasihat politik Demidov.

Demidov merupakan politisi senior yang dikenal sebagai pengikut setia ideologi neo- Eurasianisme. Demidov menjabat sebagai Ketua Duma dan Ketua Direktorat Ideologi Partai Rusia Bersatu (Rice-Cameron, 2017). Selain itu, pengaruh ideologi politik Dugin juga dapat dilacak dalam faksi militer Rusia. Hal ini terlihat dari adanya kurikulum yang mewajibkan pengkajian intensif terhadap buku teks geopolitik karya Dugin yang berjudul *The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia*, di setiap akademi militer Rusia khususnya untuk pendidikan keperwiraan setingkat jenderal bintang satu maupun jenjang kepangkatan yang lebih tinggi (Gilbert, 2018).

Sebelum membahas gagasan Dugin yang berkaitan dengan pembentukan konsep *rossiiskii*, perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa identitas nasional Rusia baik di era Kekaisaran Rusia, Uni Soviet maupun Putin, secara dominan dibentuk oleh faktor-faktor sosio-kultural, utamanya berbentuk kondisi psikis yang berupa kebangkitan kesadaran nasional (*national awakening*) yang dialami oleh etnis-etnis mayoritas di Rusia (Solovei, 2014: 35). Meskipun di pertengahan dekade 2000-an sempat terjadi kebangkitan kesadaran kebangsaan dan semangat solidaritas etnis Slavia Timur yang terwujud dalam proliferasi paham etnonasionalisme eksklusif beserta kemunculan semboyan anti-multikulturalisme yang berbunyi "*Rusia untuk Russkii*" (Solovei, 2014: 29), namun pemerintahan Putin terbukti berkomitmen untuk mengusung identitas nasional Rusia yang inklusif dalam bentuk konsep *rossiiskii*, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan konsep kewarganegaraan khas Rusia pada sub-bab "*Russkii dan Rossiiskii Sebagai Konsep Pembentuk Identitas Kolektif Rusia Modern di Era Putin*".

Perspektif Eurasianisme meyakini adanya kesadaran nasional Rusia yang berakar dari proses sintesis terhadap berbagai macam identitas-identitas budaya penduduk pribumi Rusia yang heterogen. Atas pandangan inilah, Dugin

memformulasikan pemahaman nasionalisme Rusia yang bersifat inklusif. Jacob Kipp mencatat pengertian nasionalisme inklusif menurut Aleksandr Dugin sebagai berikut:

*“... an all-Eurasian, imperial, socialist nationalism, which completely coincides with the universal, world-historical mission of the Russian people, as a people carrying not so much the principle of blood, ethnicity, but the principle of special spiritual and cultural ideal. Russian nationalism has always been integrationist, superethnic, ethical, and messianic. Not racial, not regionalistic, not local”* (Kipp, 2002: 107).

Berdasarkan pernyataan Dugin tersebut, dengan jelas terlihat adanya korelasi konseptual mengenai gagasan inklusivitas dan universalisme bangsa Rusia. Korelasi ini terdapat dalam pemahaman nasionalisme versi Dugin dan konsep *rossiiskii* yang diusung oleh rezim Putin. Berkenaan dengan hal ini, gagasan utama Dugin yang dinilai paling relevan dalam menginspirasi pembentukan nilai-nilai kebangsaan Rusia kontemporer yang bersifat inklusif dan universal adalah narasi benturan geopolitik antara blok Eurasian dan Atlantis.

Sebagai seorang ideolog dan pakar geopolitik, Dugin mengemukakan terdapatnya benturan besar antara dua peradaban lintas negara yang membentuk tatanan dunia di sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kedua peradaban tersebut adalah peradaban Eurasia dan Atlantik (Kipp, 2002: 103). Peradaban Atlantik merupakan setiap entitas politik kolektif berskala global yang di eranya masing-masing, berhasil menguasai titik-titik pesisir strategis yang disebut dengan istilah *rimland* (Bordachev, *et al.*, 2018: 33; Clover, 2016: x). Penguasaan terhadap *rimland* ini menempatkan peradaban Atlantik sebagai kekuatan maritim global yang mampu menghegemoni mayoritas wilayah perairan dunia (Kipp, 2002: 107).

Terkecuali Kartago, setiap peradaban Atlantik di zamannya masing-masing selalu direpresentasikan oleh entitas-entitas politik yang tergabung dalam peradaban Barat (Arnold, 2017). Di era kontemporer saat ini, peradaban Atlantik dipimpin oleh Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara anggotanya adalah negara-negara NATO, persemakmuran Inggris Raya dan negara sekutu Amerika Serikat di Asia dan Amerika Selatan seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Chile. Negara-negara yang tergabung dalam peradaban Atlantik ini secara kolektif dapat disebut sebagai blok Atlantisis (*Atlanticist*), *Modialist* ataupun *globalist* (Dugin, 2014: 36). Terdapat karakteristik universal yang dimiliki oleh blok Atlantisis di era negara-bangsa model Westphalia, yakni dominannya ideologi individualisme, liberalisme sekuler dan sistem ekonomi kapitalis (Arnold, 2017; Berzina, 2018: 172). Dugin memaparkan bahwa blok Atlantisis memiliki misi kolektif, yakni untuk mewujudkan agenda tatanan dunia baru yang berkutub tunggal (*unipolar*) (Dugin, 2014: 43).

Menurut Dugin, blok Atlantisis yang saat ini dipimpin Amerika Serikat berupaya untuk menyebarluaskan penerapan sistem ekonomi, tatanan sosial-kemasyarakatan dan nilai-nilai budaya khas Barat ke seluruh dunia melalui kebijakan-kebijakan yang koersif dan ekspansionis. Blok Atlantisis memusuhi sistem alternatif yang tidak sesuai dengan paham individualisme, demokrasi sekuler dan kapitalisme (Berzina, 2018: 172). Blok ini juga aktif mencegah terbentuknya tatanan dunia *multipolar* yang dinilai mengancam kelangsungan hegemoni tunggal peradaban Atlantik terhadap negara-negara bangsa di dunia (Dugin, 2014: 59; Shekhovtsov, 2014). Terkait dengan agenda pembentukan tatanan dunia baru yang diusung oleh blok Atlantisis, Dugin menyatakan pandangan moralisnya yang kritis dan negatif terhadap sistem berkutub tunggal dalam kalimat berikut:

*“The unipolar world is brutal, unjust, deformed, and depraved. As something imposed on others by force, pressure and blackmail, the American ‘new world order’ will lead to the even more intense escalation of violence, terrorism, and the exploitation of the poor and weak by the rich and strong”* (Kipp, 2002: 115).

Di sisi lain, ideologi neo-eurasianisme yang digagas oleh Dugin, menempatkan seluruh entitas politik yang tidak tergabung dalam blok Atlantis sebagai anggota potensial blok Eurasian (Berzina, 2018: 172). Di era pasca Perang Dingin, blok ini umumnya beranggotakan negara-negara *Commonwealth of Independent States* (CIS) dan negara-negara berkembang dunia ketiga di Asia dan Afrika. Blok Eurasian merupakan manifestasi dari peradaban Eurasia yang menurut narasi sejarah neo-eurasianis, selalu dipimpin oleh kekaisaran agung yang menguasai wilayah daratan seluas sebuah region atau bahkan benua (Dugin, 2014: 31-32). Wilayah daratan milik peradaban Eurasia ini disebut dengan istilah *heartland* (Gilbert, 2018; McCoy, 2015).

Dugin mengemukakan bahwa di sepanjang era klasik, peradaban Eurasia dipimpin oleh Kerajaan dan Kekaisaran Romawi. Kemudian pasca keruntuhan Romawi Barat, Kekaisaran Romawi Timur atau Byzantium didaulat sebagai pemimpin blok Eurasian. Pasca penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Ottoman Turki, Kekaisaran Rusia selaku pewaris kejayaan Kekaisaran Romawi yang juga memperoleh legitimasi sah sebagai Romawi Ketiga, merupakan pemimpin alamiah peradaban Eurasia. Federasi Rusia selaku aktor negara penerus Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia pun memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengemban tugas sebagai pemimpin peradaban Eurasia (Dugin, 2014: 32-33). Tak hanya itu, Dugin juga berpendapat bahwa status Federasi Rusia selaku negara pemimpin blok Eurasian, menyebabkan terjadinya perpindahan posisi *heartland*. Saat ini kawasan *heartland* meliputi teritori negara Rusia kontemporer

khususnya daerah Moscow, Volga dan Pegunungan Ural (Clover, 2016).

Dalam pandangan neo- Eurasianisme, blok Eurasian mengusung misi bersama untuk menciptakan tatanan dunia yang berkutub jamak alias *multipolar*. Negara-negara yang tergabung dalam blok Eurasian berupaya untuk menangkal upaya dominasi global yang diusung oleh blok Atlantis. Blok ini juga bermaksud mempertahankan pluralitas sistem politik, ekonomi, budaya dan agama yang dianut oleh berbagai negara di dunia (Dugin, 2012: 136-137), serta mendukung terwujudnya cita-cita keadilan sosial antar bangsa (Borzina, 2018: 172). Perlu dipahami bahwa sumber solidaritas negara-negara bangsa yang tergabung dalam blok Eurasian, tidaklah berasal dari kesamaan ideologi, sistem politik maupun identitas keagamaan tertentu. Namun semangat persatuan dan kooperasi ini didasari atas motif kepentingan kolektif untuk melindungi eksistensi negara masing-masing dari ancaman hegemoni blok Atlantis yang dipersepsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus dikalahkan (Kipp, 2002: 101).

Motif pragmatis berupa adanya kepentingan bersama untuk mengalahkan blok Atlantis inilah yang mendorong Dugin beserta tokoh-tokoh neo- Eurasianis lainnya untuk aktif mempengaruhi administrasi Putin guna melakukan reformulasi rencana geopolitik Rusia. Menurut para neo- Eurasianis, Rusia harus memelopori pembentukan poros aliansi Eurasian baru yang sesuai dengan realitas geopolitik kontemporer (Bordachev, *et al.*, 2018: 9; 32-33). Dugin menyarankan agar pemerintahan Putin memprioritaskan pelaksanaan misi diplomatik ke negara-negara berkembang di kawasan Eropa Timur, Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia Timur (Kipp, 2002: 108; Laruelle, 2006: 7). Dengan terbentuknya poros aliansi Eurasian yang beranggotakan negara-negara sekutu strategis yang setidaknya terdiri dari Iran, Irak, Suriah, Libya, Bulgaria, Macedonia, Romania dan Yunani, blok Eurasian

akan dapat melindungi kawasan *heartland* dari ancaman ekspansionis blok Atlantisis (Kipp, 2002: 101).

Berdasarkan pemaparan tersebut, terlihat adanya narasi benturan dan konflik yang bersifat abadi dan tak terhindari antara peradaban Eurasia sebagai hegemon daratan dan peradaban Atlantik selaku kekuatan maritim global. Narasi benturan antara dua peradaban ini terjadi dalam tataran ideologis maupun geopolitis (Kipp, 2002: 107). Neo- Eurasianis meyakini bahwa berbagai fenomena monumental yang terjadi dalam arena politik internasional, diakibatkan secara langsung maupun tak langsung, atau setidaknya memiliki korelasi paradigmatik dengan benturan abadi antara blok Eurasian dan Atlantisis (Berzina, 2018: 172; Laruelle, 2006: 8-9). Logika oposisi biner antara Rusia dan negara-negara Barat selaku perwakilan utama dari dua peradaban yang secara hakiki saling bertentangan ini, dengan jelas terlihat dalam pernyataan Dugin sebagai berikut: “*Russia and the West are different civilizations, the contradictions between them were laid down long ago and will never disappear, and the basic law of geopolitics is ‘either we or they’*” (Kipp, 2002: 91).

Terdapat dua pernyataan yang dapat disimpulkan dari pemaparan gagasan Dugin di atas. Yang pertama ialah terjadinya penyebaran gagasan neo- Eurasianis di tubuh elit Kremlin pendukung Putin dan faksi militer Rusia yang berupa narasi benturan antara peradaban Eurasia yang dipimpin oleh Rusia dan peradaban Atlantik yang diketuai oleh Amerika Serikat. Proliferasi gagasan neo- Eurasianis ini dilakukan oleh tokoh-tokoh publik pendukung neo- Eurasianisme yang menjabat sebagai anggota parlemen, elit partai politik, birokrat dalam kabinet Putin, maupun perwira militer. Kedua, terdapat penguatan pengaruh logika oposisi biner yang bersifat *zero sum* di tubuh pemerintahan Putin selaku pemegang kebijakan. Logika semacam ini mensyaratkan harus adanya pemenang dan pecundang dalam konfrontasi Rusia versus Barat.

Kedua simpulan induktif tersebut berkorelasi dengan tumbuh dan berkembangnya mentalitas penuh kecurigaan dan paranoia berlebihan kepada Barat yang menjangkiti elit dan publik Rusia, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di bagian analisis *speech act* dan ancaman eksistensial. Simpulan yang merupakan intisari gagasan Dugin tersebut juga turut menyebabkan revitalisasi ide ekspansionisme dan imperialisme Rusia yang sebelumnya sempat populer di era Kekaisaran Rusia (Clover, 2016: 10-11; Kipp, 2002: 109-110). Ide ini memberikan pembenaran moral bagi rezim Putin untuk melegalkan segala cara dan siasat yang mampu memenangkan Rusia dalam konflik peradaban melawan Barat, salah satu strategi tersebut adalah dengan membubarkan lima belas NGO afiliasi asing yang beroperasi di wilayah Rusia.

Perlu dipahami bahwa gagasan *manifest destiny* versi Rusia yang berasal dari *worldview* neo-eurasianis, tidak hanya dipercayai oleh elit Kremlin dan kaum intelektual Rusia, namun juga terindikasi kuat didukung dan disetujui oleh rakyat Rusia secara luas. Fakta ini dibuktikan oleh hasil survei *Yuri Levada Analytical Center*, yang memperlihatkan peningkatan signifikan atas opini publik yang menyetujui bahwa bangsa Rusia merupakan bangsa terpilih yang memiliki misi khusus dalam sejarah dunia, sehingga tidak dapat disamakan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia (Yuri Levada Analytical Center, 2018: 30). Opini ini mengalami peningkatan popularitas yang stabil di sepanjang era kepemimpinan Putin, berbarengan dengan penyebaran dan penguatan (*mainstreaming*) gagasan-gagasan neo-eurasianis melalui saluran media dan ruang-ruang publik yang diprakarsai oleh Aleksandr Dugin dan Edvard Limonov melalui Partai Bolsevik Nasional dan organisasi-organisasi politik maupun *think-tank* berideologi neo-eurasianis lainnya (Kipp, 2002: 107-108).

Tabel 4.1 Survei *Manifest Destiny* Rusia

**Which of the statements would you rather agree with?**

	1992 IV	1999 IV	2016 X	2017 X
Russians are a great nation, which has a special mission in the world history *	13	57	57	64
Russians are a nation as any other	80	36	34	32
Difficult to answer	7	7	9	4
Number of respondents	2000	2000	1600	1600

\* - 1992 questionnaire. - "the chosen people"

(Sumber: Yuri Levada Analytical Center, 2018: 30)

Terkait dengan konsep *rossiiskii*, narasi benturan antara peradaban Eurasian dan Atlantik beserta logika oposisi biner yang digagas oleh Dugin, menuntut perwujudan negara Rusia yang jauh lebih kuat, stabil, berdaya dan kokoh dibandingkan negara Rusia di era Gorbachev maupun Yeltsin. Realisasi Federasi Rusia yang dinilai lebih superior di berbagai aspek tersebut, hanya dapat diwujudkan melalui komitmen serius dalam upaya penetapan identitas kolektif Rusia kontemporer yang dapat diterima oleh semua kelompok etnis, suku dan agama. Inklusivitas identitas kolektif ini dinilai vital dalam mempererat persatuan nasional Rusia yang rakyatnya terdiri dari beraneka ragam suku, klan, etnis, agama dan adat-istiadat.

Selain itu, seruan Dugin yang menekankan pentingnya pembentukan poros aliansi anti-Barat pimpinan Rusia dan beranggotakan negara-negara Eropa Timur, Afrika Utara dan Timur Tengah yang secara moral dituntut untuk memiliki rasa solidaritas dan semangat persatuan tinggi, menginspirasi penetapan identitas nasional Rusia yang dinilai mampu mewujudkan solidaritas dan persatuan rakyat Rusia di tingkat federal. Identitas inklusif semacam inilah yang dimanifestasikan dalam konsep kewarganegaraan *rossiiskii*. Gagasan persatuan blok Eurasian yang berada pada tataran regional atau sub-sistem internasional, menginspirasi pembentukan konsep kebangsaan khas Rusia dalam bentuk *rossiiskii* yang berlaku dalam tingkatan negara-bangsa.

Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa seruan Dugin terkait pentingnya menjunjung tinggi solidaritas dan persatuan

antar negara-negara anggota blok Eurasian yang memiliki heterogenitas sistem politik, ekonomi, budaya dan agama, menginspirasi kemunculan ide dan upaya untuk merealisasikan terwujudnya inklusivisme, solidaritas dan persatuan antar warga negara Rusia yang secara demografis terdiri dari berbagai suku, klan, etnis, budaya dan agama. Ide dan inisiatif ini menghasilkan konsep kenegaraan *rossiiskii*.

Kebangkitan identitas kolektif Rusia versi *rossiiskii* yang terinspirasi dari gagasan universalisme dan semangat persatuan blok Eurasian yang diusung oleh para neo-eurasianis seperti Aleksandr Dugin, mengakibatkan melemahnya pengaruh gagasan *russkii* di tubuh rakyat Rusia beretnis Slavia Timur. Nasionalisme *russkii* yang di akhir era Yeltsin sempat mengalami peningkatan popularitas di kalangan warga Rusia beretnis Slavia Timur tersebut, sejak periode kedua masa kepresidenan Putin di tahun 2005 tercatat mengalami pelemahan dukungan secara drastis dan signifikan dikarenakan upaya rezim Putin dalam mendukung dan mempromosikan *rossiiskii* sebagai satu-satunya identitas tunggal pemersatu rakyat Rusia yang terdiri dari beraneka ragam etnis, suku, ras, agama dan tradisi. Terkait dengan pelemahan identitas *russkii* ini, Valeriy Solovei memaparkan pernyataan berikut:

*“The ethnic Russian identity has lost its imperial-union character, its messianic, and, in general, transcendental dimension. The idea of Russians’ special destiny in the eschatological perspective, which was a persistent theme of Russian intellectual and cultural history, has become degraded and is no longer able to evoke excitement; it retains meaning only as a nucleus of historical identity”* (Solovei, 2014: 33-34).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Solovei menekankan bahwa mayoritas rakyat beretnis Slavia Timur di Rusia kontemporer, kini memandang identitas etnis *Russkiye* hanya sebagai perspektif kesejarahan kolektif belaka. Etnis mayoritas ini tidak lagi mendukung pergerakan politik yang identik

dengan etnonasionalisme dan paham-paham radikal lainnya. Sebaliknya, terdapat tren yang memperlihatkan menguatnya dominasi gagasan *rossiiskii* di Rusia. Indikasi ini terlihat dari meningkatnya rasa kebanggaan rakyat Rusia terhadap kekayaan dan keanekaragaman budaya, tradisi, bahasa dan etnis pribumi Rusia sebanyak dua kali lipat pada November 2017, jika dibandingkan dengan opini masyarakat di akhir tahun 1994 (Yuri Levada Analytical Center, 2018: 30).

Perlu diperhatikan pula bahwa beberapa riset dan survei menunjukkan fakta bahwa mayoritas rakyat Rusia memiliki persepsi yang negatif dan bahkan konfrontatif terhadap negara-negara Barat utamanya Amerika Serikat sejak periode kedua masa kepresidenan Putin pada tahun 2005 (Yuri Levada Analytical Center, 2018). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, persepsi negatif ini tentunya berakar dari proliferasi wacana dan diskursus publik terkait gagasan neo-urasianis mengenai pertentangan abadi antara blok Atlantisis yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Eurasian yang dipimpin Rusia. Survei publik yang diadakan oleh *Yuri Levada Analytical Center* terhadap 1600 responden pada Desember 2017, memperlihatkan bahwa Amerika Serikat dipersepsi sebagai musuh utama Rusia, dan diikuti oleh negara-negara Eropa peringkat kedua (Yuri Levada Analytical Center, 2018: 191). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Persepsi Musuh Rusia

**Who would you name the enemies of Russia?**  
(% of those, who think that there are enemies)

USA, D. Trump	68
Europe	41
Ukraine, P. Poroshenko	28
ISIS, world terrorism, radical islam	10
NATO	6
Corruptioners	4
Russian government, ministers, state officials	4
Oligarhs, Putins' friends	3
Liberals	2
The West	2
Japan	2
China	2
Georgia	1
Russophobes	1
Putin, Russian president	1
We are our own enemies	2
Enemies are everywhere	4
Other countries (South Korea, Iraq, Iran, United Arab Emirates, etc)	5
Difficult to answer	5

2017, December, N=1600

(Sumber: Yuri Levada Analytical Center, 2018: 191)

Rangkaian pemaparan di atas, memperlihatkan adanya korelasi konseptual antara formulasi *referent object* dan sentimen anti-Barat yang terdapat dalam rumusan *speech act* dan ancaman eksistensial pada kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing di Rusia. Berkaitan dengan hal ini, dapat disusun sebuah argumen yang menyatakan bahwa dalam konteks kasus pembubaran NGO afiliasi asing tersebut, *referent object* yang berupa identitas kolektif *rossiiskii*, ternyata memiliki akar ontologis yang dapat dilacak kepada gagasan-gagasan politik Aleksandr Dugin dan tokoh-tokoh neo-eurasianisme lainnya.

Narasi geopolitik neo-eurasianis yang menekankan bahwa dinamika politik internasional di sepanjang sejarah peradaban manusia tidak lain adalah perwujudan dari konflik abadi antar blok Atlantisis dan Eurasian, pada akhirnya melahirkan sikap anti-Barat dikarenakan keikutsertaan negara-

negara Barat dalam blok Atlantis. Sentimen anti-Barat ini didasari oleh logika oposisi biner dan mentalitas ‘kita melawan mereka’, yang kemudian mendorong kewajiban pembentukan identitas nasional Rusia yang universal dan inklusif. Konstruksi identitas *rossiiskii* ini bertujuan untuk mengokohkan persatuan Rusia selaku negara pemimpin blok Eurasian, sehingga mampu mempertahankan diri dari gempuran musuh abadinya, yakni blok Atlantis. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, blok Atlantis bertujuan untuk menciptakan hegemoni tunggal melalui realisasi skema tatanan dunia baru yang *unipolar* dan pelaksanaan agenda westernisasi, liberalisasi dan demokratisasi berskala global, guna menciptakan homogenitas sistem ekonomi, politik dan sosial berupa kapitalisme, sistem politik demokrasi sekuler dan norma sosial ala Barat yang menjunjung tinggi individualisme.

Penguatan identitas kolektif *rossiiskii* yang disebabkan oleh proliferasi sentimen anti-Barat di tubuh elit dan rakyat Rusia tersebut, dapat pula dijelaskan melalui proposisi dasar yang terdapat dalam teori identitas sosial (*social identity theory*) yang dikembangkan oleh Henri Tajfel. Proposisi dalam teori ini menyatakan bahwa keberadaan kelompok lain yang dipersepsi sebagai ancaman atau kompetitor (*outgroup*) oleh suatu kelompok yang menjadi subjek pelaku persepsi (*ingroup*), berkontribusi dalam meningkatkan intensitas persatuan dan kohesi sosial antar anggota ingroup tersebut (McLeod, 2008; Tajfel, 1974: 66-67).

Berdasarkan proposisi inti yang terdapat dalam teori identitas sosial tersebut, maka dapat diinferensi bahwa adanya narasi Atlantis versus Eurasian dalam *worldview* neo-urasianis yang dianut oleh elit Kremlin dan publik Rusia di era Putin, mengakibatkan timbulnya persepsi negatif terhadap negara-negara Barat utamanya Amerika Serikat selaku pemimpin blok Atlantis. Adanya proliferasi sentimen anti-Barat dan Amerika Serikat tersebut, meningkatkan intensitas

persatuan dan solidaritas sosial rakyat Rusia yang terwujud dalam realisasi identitas nasional *rossiiskii* yang menjunjung tinggi semangat inklusivisme politik dan ideal *unity in diversity*.

### **G. Analisis *Extraordinary Measures* dalam Kasus Pembubaran NGO Asing di Rusia**

Pada pembahasan asumsi ontologis teori sekuritisasi di kerangka teori Bab I, telah dinyatakan bahwa kasus sekuritisasi ditentukan oleh diterima atau tidaknya *speech act* yang menarasikan adanya ancaman eksistensial terhadap *referent object* tertentu, oleh *target audience*. Kemudian, hanya dengan diterimanya realitas intersubjektif yang dikonstruksi melalui tindakan *speech act* oleh *target audience*, maka *securitizing actor* baru akan memperoleh legitimasi politik untuk melaksanakan *extraordinary measures* yang menjadi tujuan upaya *securitizing move* tersebut. Dalam subbab ini akan ditinjau *extraordinary measures* yang dilakukan oleh administrasi Putin. Berkenaan dengan hal tersebut, harus dibuktikan pula adanya penerimaan rakyat Rusia selaku *target audience* terhadap adanya ancaman eksistensial berupa keberadaan NGO asing asal Barat yang mengusung agenda westernisasi, liberalisasi dan demokratisasi, yang termanifestasi ke dalam peningkatan sentimen negatif terhadap negara-negara Barat utamanya Amerika Serikat melalui data kuantitatif yang relevan dengan kasus pembubaran belasan NGO asing tersebut.

Dalam kasus sekuritisasi yang ditelaah dalam skripsi ini, pemerintahan Putin selaku *securitizing actor* melaksanakan *extraordinary measure* yang berupa implementasi *Law on Undesirable Organisations* untuk membubarkan lima belas NGO afiliasi asing dari kurun waktu Juli 2015 hingga Agustus 2018. Simpulan ini dapat ditetapkan dengan tegas dikarenakan seperti yang telah dijelaskan panjang lebar pada bab II, *Law on Undesirable Organisations* merupakan satu-satunya perangkat hukum sah di Rusia yang memiliki kekuatan hukum untuk

membubarkan NGO afiliasi asing yang divonis sebagai *undesirable organisation* secara sepihak. Pengesahan legislasi ini dengan implementasi pertamanya untuk membubarkan NED pun, hanya berselang dua bulan saja. Rentang waktu yang sangat singkat ini tentunya dapat digunakan untuk menilai terdapatnya unsur drastis, mendesak dan darurat dalam penegakkan *Law on Undesirable Organisations* tersebut, sehingga memenuhi karakteristik utama yang harus dimiliki oleh konsep *extraordinary measures* dalam teori sekuritisasi versi Mazhab Copenhagen.

Terkait dengan pembuktian adanya penerimaan dan persetujuan rakyat Rusia terhadap adanya ancaman eksistensial yang dipercaya membahayakan kelangsungan identitas kolektif *rossiiskii*, dapat merujuk kepada data kuantitatif yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga riset berkredibilitas tinggi seperti *Yuri Levada Analytical Center*. Ancaman eksistensial yang sebelumnya telah diidentifikasi dan dipaparkan pada sub-bab analisis *speech act*, merujuk kepada keberadaan agen-agen Barat berkedok NGO di Rusia, maupun mengacu kepada agenda dan kepentingan pro-Barat yang sedang diupayakan agen-agen asing tersebut. Fakta terdapatnya agenda dan kepentingan pro-Barat yang diusung oleh berbagai NGO afiliasi asing di Rusia, telah banyak didokumentasikan oleh para sarjana dan jurnalis. Fakta ini dengan jelas dinyatakan Sarah Henderson sebagai berikut: “*As a result, Russian NGOs, rather than setting the agenda, are often responding to U.S.-set agendas, problems, and needs. This encourages NGOs to reflect U.S. priorities rather than ‘objective’ Russian NGO needs*” (Henderson, 2002: 155).

Patrick L. Smith, seorang jurnalis independen memaparkan investigasinya terkait beberapa NGO afiliasi Amerika Serikat yang aktif beroperasi di Rusia ataupun negara-negara dunia ketiga lainnya. Smith menyatakan bahwa sejak era Yeltsin, pemerintah Amerika Serikat telah mendirikan beberapa NGO yang ditujukan untuk “*Remake all*

*of Russia in their own image*” (Smith, 2015). Terkait *Charles Stewart Mott Foundation* selaku NGO asal Amerika Serikat yang menutup sekretariat dan menghentikan kegiatannya di Rusia sebelum dibubarkan secara langsung oleh pemerintahan Putin (White, 2015), Smith menjelaskan:

*“The Charles Stewart Mott Foundation, which began humbly enough doing community work in Flint, Michigan, but is now up to its knees in ‘civic activism’ and ‘civil society development’ in Russia and the former Soviet satellites. A project Mott funded in June studies ‘citizen protests, demonstrations, and discontent’ in these nations”* (Smith, 2015).

Perihal Freedom House selaku NGO yang tidak memiliki sekretariat di Rusia namun aktif berkegiatan di Ukraina dan negara-negara tetangga Rusia lainnya, Smith menulis penelusurannya secara panjang lebar:

*“... Freedom House is problematic, to put the point too mildly. Cuba has long accused it of being a C.I.A. front, which is only administratively untrue: It routinely takes funds from the Agency for International Development, another U.S. government organization and a longtime conduit for money deployed in the service of foreign subversions. ... State had used Freedom House as a conduit to fund ‘clandestine activities’ in Iran. ‘Far more often than is generally understood,’ the FT [Financial Times] quoted Freedom House as asserting, ‘the change agent is broad-based, non-violent civic resistance—which employs tactics such as boycotts, mass protests, blockades, strikes and civil disobedience to de-legitimate authoritarian rulers and erode their sources of support, including the loyalty of their armed defenders’. ... Freedom House started sending A.I.D. funds to Ukrainian ‘civil society’ NGOs, which did years of advance work prior to last year’s coup, as early as 2004”* (Smith, 2015).

Berkenaan dengan misi NED di negara-negara berkembang, Smith menjelaskannya sebagai berikut:

*“No one seems to dispute the N.E.D.’s mission to destabilize governments not to Washington’s liking. ... Carl Gershman, the N.E.D.’s president, is on the record saying the agency’s work is to funnel funds to opposition groups in countries such as Russia and Venezuela. The autumn prior to the coup in Kiev he described Ukraine as ‘the biggest prize.’ Responding to Moscow’s ruling that the N.E.D. has to go, Gershman wrote an opinion piece in the Washington Post saying it is ‘the latest evidence that the regime of President Vladimir Putin faces a worsening crisis of political legitimacy’” (Smith 2015).*

Di akhir tulisannya, Smith mengutarakan simpulan pesimisnya terhadap berbagai NGO asal Amerika Serikat yang beroperasi di negara-negara dunia ketiga. Smith menyimpulkan bahwa NGO asal Amerika tersebut didirikan untuk merealisasikan agenda dan kepentingan Amerika Serikat di masing-masing negara tempatnya berkegiatan. Berikut ini rangkaian kalimat yang dikemukakan oleh Smith:

*“... NGoland has long, long been too polluted with mal-intended missions for any foreign power reasonably to tolerate such agencies on their soil. All of these groups claim to be independent of government, but as Freedom House’s history illustrates, this means only that Washington has outsourced certain of its unpublicized policy functions” (Smith, 2015).*

Terdapat beberapa informasi yang dapat disimpulkan dari kutipan-kutipan di atas. Simpulan pertama yakni dapat dipastikan bahwa NGO afiliasi Amerika Serikat di Rusia, memang memprioritaskan realisasi agenda dan kepentingan Amerika Serikat dibandingkan memperjuangkan kebutuhan *civil society* domestik. Kesimpulan kedua menyatakan bahwa setidaknya sejak era Yeltsin, pemerintah Amerika Serikat telah mendirikan beberapa NGO di Rusia yang ditujukan untuk menjadi agen pembentuk negara Rusia baru yang turut mengusung ideologi, sistem ekonomi, politik dan nilai-nilai sosio-kultural Barat.

Kesimpulan ketiga adalah terdapatnya keterlibatan NGO asing dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian berbagai misi kladestin maupun kegiatan mobilisasi massa yang ditujukan untuk mengoyahkan kestabilan politik dan mendelegitimasi penguasa di negara-negara pecahan Uni Soviet, termasuk pula Rusia. Kegiatan mobilisasi massa tersebut dapat berbentuk protes publik, demonstrasi massal, boikot, blokade, pemogokan, hingga pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Sedangkan misi klandestin yang dimaksud umumnya berbentuk program bantuan, pelatihan dan pemberdayaan bagi pihak oposisi yang menentang rezim anti-Amerika Serikat di suatu negara, atau membantu pelaksanaan kudeta oleh pihak oposisi terhadap rezim penentang Amerika Serikat tersebut, seperti yang terlihat pada peristiwa *Color Revolution* di Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya (Smith, 2015).

Berkenaan dengan data kuantitatif yang mengindikasikan adanya penerimaan dan dukungan rakyat Rusia terhadap sentimen anti-Barat yang dinarasikan dalam tindakan speech act pada kasus pembubaran NGO afiliasi asing di Rusia ini, dapat merujuk kepada dokumen laporan survei opini publik tahunan yang dirilis oleh *Yuri Levada Analytical Center*. Perlu ditekankan bahwa tabel-tabel sebelumnya yang berisi hasil survei terkait persetujuan responden terhadap *manifest destiny* versi Rusia dan persepsi publik terhadap musuh Rusia, masih sangat relevan untuk dijadikan bukti kuantitatif yang mengindikasikan adanya dukungan kuat rakyat Rusia terhadap sentimen anti-Barat tersebut. Tabel pertama menunjukkan bahwa rakyat Rusia meyakini adanya takdir besar bangsa Rusia yang mengemban misi khusus dalam sejarah dunia, sehingga Rusia tidaklah setara dan dapat disamakan dengan negara-negara lainnya. Sedangkan tabel kedua memperlihatkan bahwa rakyat Rusia mempersepsi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebagai musuh bagi Rusia.

Untuk memperkuat pembuktian terkait adanya penerimaan dan dukungan rakyat Rusia terhadap narasi anti-Barat yang terkandung dalam formulasi ancaman eksistensial dalam kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing ini, maka perlu ditelaah data kuantitatif lainnya, khususnya yang memperlihatkan penilaian rakyat Rusia terhadap negara-negara Barat. Terkait pandangan rakyat Rusia terhadap negara-negara Barat tersebut, *Yuri Levada Analytical Center* mengadakan survei terhadap 1600 responden pada Mei 2017 lalu. Survei tersebut menunjukkan bahwa sejak pertengahan 2014, terdapat tren yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan atas sentimen negatif rakyat Rusia terhadap negara-negara Barat utamanya Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Polandia (Yuri Levada Analytical Center, 2018: 194). Amerika Serikat dinilai sebagai negara yang paling tidak ramah atau bahkan paling bermusuhan terhadap Rusia. Sedangkan Jerman, Inggris dan Polandia yang dalam kurun 2005 hingga 2013 cenderung dinilai tidak bermusuhan dengan Rusia, sejak 2014 semakin dipandang bersikap memusuhi Rusia.

Tabel 4.3 Negara yang Dinilai Bersikap Memusuhi Rusia

Name five countries which you would call unfriendly or hostile  
in relation to Russia?

(answers are ranked by the last poll)

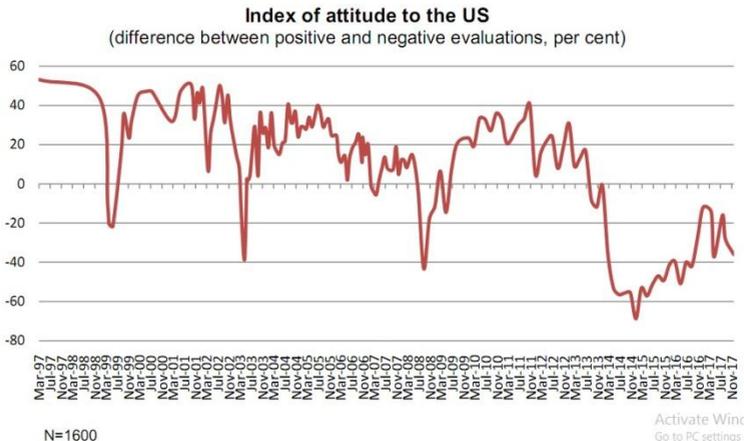
	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	V	V	VIII	III	V	V	V	V	V	V	V	V
USA	23	37	35	45	26	33	35	38	69	73	72	69
Ukraine	13	27	23	41	13	20	15	11	30	37	48	50
Latvia	49	46	36	35	36	35	26	21	23	25	23	24
Lithuania	42	42	32	35	35	34	25	17	24	25	23	24
Germany	3	2	2	3	1	4	3	3	18	19	19	24
Poland	4	7	20	10	14	20	8	8	12	22	24	21
Estonia	32	28	60	30	28	30	23	16	21	19	16	16
Great Britain	3	5	3	8	6	8	7	9	18	21	18	15
Georgia	38	44	46	62	57	50	41	33	19	11	10	9
Turkey	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	29	8
France	<1	1	1	1	<1	1	1	2	5	7	4	8
Japan	6	4	3	3	3	9	6	7	5	6	5	6
Syria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Canada	1	1	<1	1	<1	1	1	1	7	8	6	3
Afganistan	12	12	11	7	14	15	8	10	5	4	2	3
Iraq	10	9	8	5	9	9	8	7	3	2	2	3
Iran	6	7	7	3	7	7	7	5	2	2	2	2
Romania	2	2	2	3	3	3	1	2	2	3	2	2
Saudi Arabia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
None/Difficult to answer	20	23	19	18	21	15	28	31	20	17	15	14

N=1600

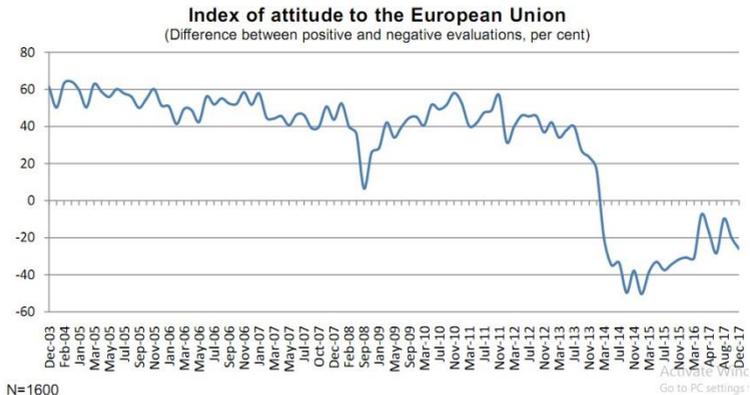
(Sumber: Yuri Levada Analytical Center, 2018: 194)

Sedangkan pada laporan survei tahunan yang dihimpun *Yuri Levada Analytical Center*, terdapat grafik yang memperlihatkan intensitas pendirian rakyat Rusia terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa (Yuri Levada Analytical Center, 2018: 198; 200). Pada kedua grafik tersebut, 1600 responden menunjukkan sikap positif terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa dari awal kepemimpinan Putin pada tahun 2000 hingga akhir 2013. Dalam konteks Amerika Serikat, memang terdapat beberapa titik yang memperlihatkan dominannya sikap negatif pada Maret 1999, April 2003 dan Agustus 2008. Namun sikap negatif tersebut surut dalam waktu relatif singkat, setelahnya tren positif pun kembali mendominasi.

Namun, sejak awal 2014 terjadi perubahan tren secara drastis dan ekstem ke arah sikap negatif hingga melebihi minus dua puluh persen. Tren negatif ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peristiwa aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia yang terjadi pada Februari hingga Maret 2014. Namun yang menarik adalah tren negatif tersebut terus berlanjut hingga November 2017, meskipun konflik Krimea telah mencapai puncak eskalasinya pada 16 Maret 2014 yang ditandai dengan pelaksanaan referendum Krimea (Morris, 2014). Fakta dan data ini memperlihatkan kebenaran argumen Thierry Balzacq, yang menyatakan bahwa berbagai diskursus yang terjadi selama proses *securitizing move*, tidaklah terisolasi dari isu dan wacana eksternal yang muncul berbarengan dengan proses tersebut. Sebaliknya, diskursus di luar kasus sekuritisasi pun turut membentuk dan membatasi dinamika proses sekuritisasi yang sedang dikaji (Balzacq, 2011: 36-37).



**Grafik 4.1 Indeks Pendirian Rakyat Rusia Terhadap AS**  
(Yuri Levada Analytical Center, 2018: 198)



**Grafik 4.2 Indeks Pendirian Rakyat Rusia Terhadap UE**  
(Yuri Levada Analytical Center, 2018: 200)

Data kuantitatif lainnya yang relevan untuk ditinjau adalah dukungan rakyat Rusia terhadap tindakan Presiden Putin selama aksi pembubaran lima belas NGO afiliasi asing yang dilakukan pada Juli 2015 hingga Agustus 2018 lalu. Survei yang diadakan oleh *Yuri Levada Analytical Center* terkait persetujuan dan ketidaksetujuan rakyat terhadap kebijakan Presiden Putin dalam kurun waktu Maret 2015 hingga Maret 2018, memperlihatkan bahwa tidak terjadi penurunan dukungan rakyat yang signifikan, dan tidak terdapat peningkatan ketidaksetujuan rakyat yang drastis pula (Yuri Levada Analytical Center, 2019). Bahkan sejak Maret 2014, angka dukungan rakyat terhadap kebijakan Presiden Putin bergerak stabil di kisaran 80-an. Data ini mengindikasikan bahwa keputusan pemerintahan Putin untuk membubarkan belasan NGO afiliasi asing secara sepihak, tidaklah mengakibatkan penurunan dukungan rakyat terhadap kepemimpinan Putin, sebaliknya angka dukungan terhadap Putin tetap berada pada tingkatan yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas rakyat Rusia cenderung mendukung dilakukannya pembubaran terhadap lima belas NGO afiliasi asing tersebut, atau setidaknya bersikap

menerima maupun netral terhadap pelaksanaan kebijakan yang represif terhadap sektor NGO tersebut.

Tabel 4.4 Persetujuan Kebijakan Presiden Putin

OVERALL, DO YOU APPROVE OR DISAPPROVE OF VLADIMIR PUTIN'S ACTIONS AS PRESIDENT OF RUSSIA?

		Approve	Disapprove	No answer
2018	Mar.	81	18	1
2017	Mar.	82	17	1
2016	Mar.	82	17	1
2015	Mar.	85	14	1
2014	Mar.	80	18	2
2013	Mar.	83	38	1
2012	Mar.	68	31	1
2011	Mar.	69	29	2
2010	Mar.	78	20	2

(Sumber: Yuri Levada Analytical Center, 2019)

Berbagai pemaparan data kuantitatif di atas, menegaskan validitas beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, ialah adanya penerimaan dan dukungan luas rakyat Rusia terhadap proliferasi persepsi negatif dan sentimen anti-Barat di Rusia yang secara genealogis berakar dari gagasan neo-eurasianis utamanya narasi konflik abadi antara blok Atlantisis dan Eurasian. Kedua, terdapat indikasi kuat yang memperlihatkan dukungan mayoritas rakyat Rusia terhadap berbagai kebijakan represif pemerintah di sektor NGO, termasuk penegakkan *Law on Undesirable Organisations* guna membubarkan lima belas NGO afiliasi asing yang diimplementasikan pada Juli 2015 hingga Agustus 2018. Ketiga, adanya pengaruh isu eksternal dalam proses *securitizing move* kasus pembubaran belasan NGO asing tersebut, khususnya dalam proses pembentukan narasi intersubjektif yang diterima oleh rakyat Rusia selaku *target*

*audience*, mengenai adanya ancaman eksistensial berupa agen-agen Barat berkedok NGO yang mengusung agenda dan kepentingan pro-Barat di Rusia. Isu eksternal tersebut tidak memiliki keterlibatan langsung dengan kasus pembubaran belasan NGO afiliasi asing ini, namun turut membantu pembentukan sikap anti-Barat utamanya sejak meningkatnya eskalasi Konflik Rusia-Ukraina terkait aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia dan keterlibatan militer Rusia di Krisis Suriah.